BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketepatan sasaran pada penerima manfaat program bantuan sosial harus mengacu pada data yang tepat. Data yang tidak dilakukan pemutakhiran, akan menimbulkan permasalahan data yakni masih ditemukannya Nomor Induk Kependudukan ganda, invalid, meninggal dunia, serta pindah domisili sehingga berdampak pada tidak akuratnya daftar penerima bantuan sosial. Melalui Kementrian sosial, berbagai cara telah dilakukan mengatasi hal ini salahsatunya Pemutakhiran Data.

Ketidakakuratan data di beberapa daerah maka tahun 2017 dibangunlah suatu sistem Informasi terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG). Kemudian Data Terpadu ini diberi nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM) yang tertuang melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. kemudian tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan nomenklatur data terpadu menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).yang sebelumnya disebut Basis Data

Terpadu (BDT). Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS pada 31 Mei 2021 namun permensos tersebut belum tersedia pedoman tata cara verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga beberapa daerah masih mempedomani permensos sebelumnya (Widyaningsih dkk, 2022 :10)

Selanjutnya peran pelaksana verifikasi dan validasi DTKS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan SIKS-NG. DTKS tersebut menjadi acuan pokok yang digunakan pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat. Namun faktanya tidak semua pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data sesuai beberapa penelusuran referensi. Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Prasetyo, (Media Indonesia.Com, 2021) bahwa:

> “Terdapat kesalahan data penerima yang cukup signifikan pada beberapa program bantuan sosial. Untuk Bantuan Pangan Non-Tunai, pada 2020, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setelah dievaluasi, ternyata hanya terdapat 13,2 juta keluarga yang terverifikasi. Begitu pula halnya dengan bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Dari total 10 juta KPM yang ditetapkan, hanya 8,9 juta yang terverifikasi. Ketidakakuratan data juga terjadi pada program Bantuan Sosial Tunai yang dianggarkan untuk 10 juta keluarga, namun hanya terverifikasi sebanyak 8,4 juta penerima.”

Adanya selisih data tersebut diatas menunjukkan bahwa perbaikan data penerima manfaat dari semua Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia belum efektifnya verifikasi yang dilakukan.

Sedangkan Untuk rentang tahun 2017 hingga periode bulan oktober 2020 Kabupaten/Kota yang paling aktif melakukan pemutakhiran DTKS adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Kabupaten/Kota yang paling aktif melakukan pemutakhiran DTKS
Tahun 2017 hingga periode Bulan Oktober 2020

No	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Jumlah Perbaikan	Jumlah Usulan	Jumlah Nonaktif	Jumlah Verval	Jumlah DTKS
1	Kep.Riau	Karimun	13.440	1.877	281	15.317	15.307
2	Jawa Timur	Kota Blitar	7.317	55	482	7.372	7.381
3	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	46.024	3.136	1.727	49.160	49.474
4	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	88.219	722	1.338	88.941	89.897
5	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	81.588	2	2.428	81.590	84.148
6	DKI Jakarta	Kota Jarta Selatan	73.744	3.096	1.671	76.840	79.261
7	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	61.380	3.340	1.268	64.720	66.883
8	DKI Jakarta Jakarta	Kepuluan Seribu	1.884	-	15	1.884	1.979
9	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai	26.504	-	391	26.504	27.908
10	Kalimantan Timur	Berau	7.097	8	292	7.105	7.547

Sumber : Buku Putih Reformasi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial, 2020

Selanjutnya Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Said Mirza Pahlevi dalam Pertiwi (Media Indonesia.Com, 2021) menyatakan bahwa “ada 47 kabupaten kota yang belum pernah update Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) sama sekali sejak Pemutahiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015" (Media Indonesia.com, 2021).

Tabel 2
Daftar Kabupaten Kota yang belum pernah update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial hingga 2020

NO	PROVINSI	KAB/KOTA
1	Sulawesi Tengah	Donggala
2	Sulawesi Selatan	Bone
3	Sulawesi Selatan	Wajo
4	Sulawesi Selatan	Tanah Toraja
5	Sulawesi Tenggara	Muna
6	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara
7	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
8	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau
9	Sulawesi Barat	Mamasa
10	Maluku	Maluku Tenggara Barat
11	Maluku	Kepulauan Aru
12	Maluku	Seram Bagian Timur
13	Maluku	Maluku Barat Daya
14	Maluku Utara	Kepulauan Sula
15	Maluku Utara	Pulau Taliabu
16	Papua Barat	Fakfak
17	Papua Barat	Kaimana
18	Papua Barat	Teluk Wondama
19	Papua Barat	Teluk Buntuni
20	Papua Barat	Manokwari
21	Papua Barat	Sorong Selatan
22	Papua Barat	Sorong
23	Papua Barat	Tambrau
24	Papua Barat	Maybrat
25	Papua Barat	Pegunungan Arfak
26	Papua	Nabire
27	Papua	Kepulauan Yapen
28	Papua	Biak Numfor
29	Papua	Paniai
30	Papua	Puncak Jaya
31	Papua	Bovin Digoel
32	Papua	Asmat
33	Papua	Yahukimo
34	Papua	Pegunungan Bintang
35	Papua	Tolikara

36	Papua	Sarmi
37	Papua	Waropen
38	Papua	Supiori
39	Papua	Mamberamo Raya
40	Papua	Nouga
41	Papua	Lanni Jaya
42	Papua	Mamberamo Tengah
43	Papua	Yalimo
44	Papua	Puncak
45	Papua	Dogiyai
46	Papua	Intan Jaya
47	Papua	Deiyai

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2022

Dari beberapa data awal diatas menunjukkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial belum maksimal di beberapa daerah. Termasuk Kabupaten Bulukumba, melalui Dinas Sosial sebagai unit kerja yang menangani Pengelolaan DTKS, pemutakhirannya sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari Rekap Data By Name By Address Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3
Rekap Data Jumlah By Name By Address (BNBA)
DTKS Kab. Bulukumba Tahun 2021-2022

NO	TGL/ BULAN	2021	2022
1	Januari	-	178,106
2	Februari	-	177,759
3	Maret	-	177,758
4	April	-	177,483
5	Mei	-	180,284
6	Juni	-	179,946
7	Juli	-	180,980
8	Agustus	-	181,002
9	September	-	-
10	13 Oktober	198,837	-
11	25 November	178,837	-
12	24 Desember	178,099	-

Sumber : Dinas Sosial Kab.Bulukumba, September 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Bulan Januari s/d September 2021 tidak ada penyetoran Data Verifikasi DTKS ke Dinas Sosial dari setiap Kelurahan dan Desa se Kabupaten Bulukumba Hal inilah yang bisa mengakibatkan penerima manfaat tidak tepat sasaran. Karena daftar penerima bantuan yang diserahkan dari dinas sosial belum dilakukan verifikasi sehingga masih terdapat data yang tidak valid misal penerima bantuan ada yang telah meninggal, NIK tidak padan Disdukcapil, pindah domisili dan bahkan ada yang sudah mampu. Kemudian di tahun 2022 mulai aktif data verifikasi yang masuk ke dinas sosial setelah dilakukan sosialisasi dan ada instruksi untuk dilakukan verifikasi dan validasi DTKS di Kelurahan atau Desa masing-masing.

Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Garis komando pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi hampir dikatakan

kurang terkoordinasi, sementara dinamika kependudukan bisa saja terjadi setiap hari bahkan setiap jam yang sangat berpengaruh terhadap kualitas DTKS itu sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sejak bulan Januari Januari tahun 2022 sudah mulai melakukan sosialisasi verfikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Drs. Andi Mappiwali dalam Radar Selatan Bulukumba 14 Februari 2022, mengatakan :

> “Awal tahun 2022 ini Dinas Sosial mulai melakukan verifikasi dan validasi DTKS di seluruh kecamatan, Desa/Kelurahan dan sebelum tim verifikasi ke lapangan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi di semua kecamatan di Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya dilakukan musyawarah desa/Kelurahan”

Disinilah Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sebagai pendorong bagi pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara aktif baik pada tahap pendataan, verifikasi-validasi, penetapan, maupun penggunaan. Dan bahkan pentingnya terus dilakukan Sosialisasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan ini, khususnya mekanisme Verifikasi dan Validasinya. Termasuk juga pentingnya ada petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verivali) yang dilakukan dari tingkat Dinas Sosial, Kecamatan serta Kelurahan dan Desa termasuk prelist awal ke pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk verivali melalui musyawarah bersama di Kelurahan/Desa sehingga terjadi sinkronisasi data dari berbagai level. Sehingga data DTKS yang terupdate secara

berkelanjutan agar data-data masyarakat yang tidak relevan lagi menerima bantuan bisa dihindari.

Selain itu pula, masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial bisa menyampaikan kepada pihak Kelurahan/Desa untuk dilakukan verifikasi maupun pendaftaran aktif masyarakat. dimana calon penerima manfaat tidak dapat menerima bantuan ketika namanya tidak terdaftar di dalam DTKS tersebut.

Dengan melihat hal tersebut diatas sangat penting Pemerintah Daerah dalam hal ini sumber daya manusia aparatur dalam melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk diperbaharui secara berkala demi menjaga kualitas dan akurasinya agar berbagai kendala dan permasalahan dapat diselesaikan sehingga penerima bantuan sosial dapat terlaksana dan tepat sasaran.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian difokuskan pada :

1. Bagaimana Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Tanahlemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba
2. Apa Kendala yang dihadapi dalam verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kelurahan Tanahlemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme verifikasi dan validasi DTKS agar terwujud data yang tepat dan valid.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam verifikasi dan validasi DTKS terhadap kualitas data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan terkait verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial serta menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala demi terciptanya kualitas data penerima bantuan sosial tepat sasaran serta masukan bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya menjadi daerah yang aktif melaksanakan verfikasi dan validasi DTKS.